



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/19 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA DAN TIM
PENILAI/PENGUJI PENJUALAN/PENGHAPUSAN BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang-barang milik Pemerintah Daerah yang rusak berat, tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas dan barang yang hilang, maka perlu dihapuskan dari daftar barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan/penjualan barang milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Panitia dan Sekretariat Panitia dan Tim Penilai/Penguji penjualan/penghapusan barang milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Dan Sekretariat Panitia Dan Tim Penilai/Penguji Penjualan/Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia dan Tim Penilai/Penguji Penjualan/Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Penjualan/Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. meneliti administrasi barang dan dokumen kepemilikannya;
 - b. meneliti kebenaran keadaan fisik barang-barang yang akan dijual/dihapuskan dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. melaporkan hasil penelitian serta mengajukan persetujuan penghapusan kepada Bupati;
 - d. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu.
- KETIGA** : Sekretariat Panitia Penjualan/Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat panitia penghapusan;
 - b. menghimpun, menginventarisir dan membuat laporan hasil kerja panitia penghapusan;
 - c. mengadministrasikan dan mengarsip hasil-hasil rapat panitia penghapusan.
 - d. melayani tugas-tugas panitia penghapusan barang milik daerah.
- KEEMPAT** : Tim Penilai/Penguji Penjualan/Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penilaian/pengujian kelayakan barang-barang yang akan dijual/dihapus;
 - b. menyiapkan administrasi penilaian/pengujian barang-barang yang akan dijual/dihapus;
 - c. melaporkan hasil penilaian/pengujian kepada Sekretariat penjualan penghapusan barang milik daerah.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Panitia Penghapusan Barang yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT
PANITIA DAN TIM PENILAI/PENGUJI
PENJUALAN/PENGHAPUSAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENJUALAN/ PENGHAPUSAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Anggota
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua merangkap Anggota
5	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota
6	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT
PANITIA DAN TIM PENILAI/PENGUJI
PENJUALAN/PENGHAPUSAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PENJUALAN/PENGHAPUSAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Kepala Bidang akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Seksi Penatausahaan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4	Pelaksana Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas terkait	Anggota Tidak Tetap

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT
PANITIA DAN TIM PENILAI/PENGUJI
PENJUALAN/PENGHAPUSAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI, PENGUJI PENJUALAN/PENGHAPUSAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Pelaksana pada Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Pelaksana pada Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Pelaksana pada Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI